

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia hingga saat ini adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan mengandung banyak pengertian tergantung siapa dan dari sudut mana cara memandangnya. Untuk itu perlu ditentukan pengertian kemiskinan dalam penelitian ini. Pengertian kemiskinan yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut :

1. Kriteria BPS: kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per kapita per hari.
2. Kriteria BKKBN: kemiskinan adalah keluarga miskin prasejahtera apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya
 - b. seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari
 - c. seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah bekerja / sekolah dan bepergian
 - d. Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah
 - e. Tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan
3. Kriteria Bank Dunia: kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1,00 per hari

Ada dua pengertian kemiskinan lain yang sering dijadikan patokan untuk memahaminya. Kedua pengertian tersebut adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan kelas pendapatan lainnya (Hadi Proyitno dan lincoln Arsyad, 1987 : 97). Sedang kemiskinan absolut diartikan sebagai suatu keadaan di mana tingkat pendapatan absolut dari satu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukiman, kesehatan dan pendidikan. Konsumsi nyata tersebut dinyatakan secara kuantitatif dan atau dalam uang berdasarkan harga pada tahun pangkal tertentu. Kemudian, karena biaya hidup di daerah kota dan pedesaan berbeda, demikian juga di antara kelompok-kelompok masyarakat di dalamnya. Maka oleh karena itu, oleh bank dunia dipakai sebagai ukuran dalam menetapkan garis kemiskinan adalah nilai US \$ 50 per kapita per tahun untuk tingkat pendapatan di desa dan US \$ 75 per kapita per tahun untuk tingkat pendapatan di kota pada tingkat harga tahun 1971 (Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, 1987 : 98).

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi berimplikasi jamak kehidupan seseorang atau masyarakat. Sebagai suatu bangsa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk diteliti sebab potret kemiskinan umat cenderung diartikan orang merupakan konsekuensi dari penganutan agama Islam. Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sudah dilakukan sejak awal Pelita Pertama,

pemerintah. Namun demikian, beberapa proyek pemerintah yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan, terutama pada jenjang *grass root*, ternyata belum mampu mengatasi berbagai dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat sejak tahun 1970-an. Akibatnya isue tentang kemiskinan seolah-olah menjadi terlupakan sampai dengan munculnya berbagai penelitian ilmiah yang mengungkap “penemuan kembali kemiskinan di Indonesia”.

Walaupun kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan klasik, tetapi sampai saat ini belum ditemukan formula yang tepat, guna merumuskan kebijakan antikemiskinan. Bahkan ketika Kabinet Pembangunan VI kemudian merealisasikan Rencana Inpres Desa Tertinggal (IDT); masih terdapat banyak kritikan terhadap program ini karena berbagai alasan. (Awan Setya Dewanta, 1995: v). Ini menunjukkan bahwa sejak semula kemiskinan bukan merupakan persoalan yang sederhana dan bahkan nampaknya akan menjadi tema pengkajian dan penelitian yang selalu aktual. Potret kemiskinan di desa sangat beragam. Apapun definisinya, kemiskinan dapat menjadi sangat mencekam karena diwariskan dari generasi ke generasi. Seorang anak yang tidak mengenyam pendidikan karena keluarganya miskin, akan membawa kemiskinan tersebut ketika tumbuh menjadi dewasa. Begitu seterusnya, estafet siklus kemiskinan akan tetap utuh sampai ada suatu kekuatan luar yang bisa mendobraknya. (Malassis, 1975: 92).

Upaya-upaya untuk menanggulangi kemiskinan telah dilakukan sejak Balita pertama, meskipun upaya tersebut bersifat makro, namun hingga saat ini

nampak terjadi pergeseran strategi dan paradigma pembangunan, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Dewanta, pergeseran itu merupakan refleksi dari perubahan kontekstual pembangunan nasional itu sendiri, juga karena terjadi kemajuan dalam setiap tahapan pembangunan nasional pada PJPT.I (Awan Setya Dewanta, 1995: 26). Strategi yang bersifat makro tersebut tampak ketika kebijakan nasional lebih bertumpu pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya dengan cara memacu perkembangan sektor swasta. Asumsi dari kebijakan ini adalah memperbesar perkembangan *kue* perekonomian nasional sebagai prioritas utama. Setelah hal itu tercapai, maka, melalui mekanisme pemerataan ke bawah (*trickle-down mechanism*) perkembangan ekonomi akan dinikmati oleh lapisan-lapisan masyarakat bawah. Namun, yang perlu juga diwaspadai, bersamaan dengan proses pertumbuhan ekonomi, juga terjadi proses yang secara diametral bertentangan dengan mekanisme tetesan ke bawah karena pada sisi lain terjadi juga penyedotan dana lokal ke pusat atau barangkali lebih tepat disebut *trickle-up*.

Fenomena semacam ini merupakan sebuah dialektika pembangunan karena sebetulnya hasil yang diharapkan dari proses pembangunan adalah keadilan sosial tetapi ada kecenderungan justru lapisan bawah yang menopang perkembangan ekonomi lapisan atas, atau dengan kata lain cita-cita mewujudkan keadilan sosial menjadi semakin jauh dari harapan.

Di samping pemerintah telah berusaha mengatasi kemiskinan, ia juga

organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam usaha pengentasan kemiskinan tersebut. (Susilaningsih,1996: 1) Oleh karena itu, sejak tahun 1993, Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul , Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Kecamatan Imogiri dan Pimpinan Ranting 'Aisyiyah Desa Karangtengah melaksanakan Program Qaryah Tayyibah dengan proposal kegiatan Nomor : 003/ PWM/ C/II/ '93, tertanggal, 17 Sya'ban 1413 H, bertepatan dengan tanggal, 10 Februari 1993 M. Sebagai mana tercantum dalam buku tuntunan kegiatan Qaryah Tayyibah, bahwa yang dimaksud Qaryah Tayyibah adalah konsep program desa yang baik, masyarakatnya selalu meningkatkan keimanan dan ke-taqwannya kepada Allah. SWT, serta mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. (Tuntunan Kegiatan Qaryah Tayyibah, 2000 : 3) Program ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupam agamis yang tinggi bagi warga masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya terutama bagi masyarakat desa tertinggal atau yang lebih dikenal dengan masyarakat "*dhu'afa*". Secara garis besar pembinaan agama melalui Program Qaryah Tayyibah dapat dibagi dalam empat kegiatan pokok yakni :

1. Pembinaan pengajian kelompok Ibu-ibu
2. Pemberian bantuan / santunan kaum *dhu'afa*
3. Mengadakan pelatihan ketrampilan industri rumah tangga

Program semacam ini termasuk kepedulian sebuah organisasi kemasyarakatan untuk ikut andil dan berbuat sesuatu dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, sehingga terwujud sikap kemandirian ekonomi bagi warga masyarakat.

Dusun Karangrejek yang terletak di Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dijadikan Pilot Proyek Pelaksanaan Qaryah Tayyibah oleh Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis mencoba mengadakan penelitian khususnya tentang pengaruh pembinaan agama melalui Program Qaryah Tayyibah terhadap sikap kemandirian ekonomi warga masyarakat. Menurut pengamatan Penulis, penelitian semacam ini di wilayah tersebut belum pernah dilakukan. Kalaupun di wilayah tersebut pernah diadakan penelitian maka penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, karena penekanannya pada bagaimana sikap kemandirian ekonomi kelompok pengajian ibu-ibu di Dusun Karangrejek sebagai akibat melaksanakan pembinaan agama melalui Program Qaryah Tayyibah.

Atas dasar pertimbangan pembahasan di atas penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian kasus tentang Pengaruh Pembinaan Agama melalui Program Qaryah Tayyibah terhadap Sikap Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Dusun Karangrejek Desa Karangtengah Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan beberapa hal yang dikemukakan dalam latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang timbul antara lain :

1. Belum diketemukannya cara yang tepat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia umumnya dan khususnya di dusun Karangrejek.
2. Pemerintah merasa belum efektif dalam mengupayakan program penanggulangan kemiskinan, sehingga perlu mendorong Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta organisasi kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Belum adanya sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan dengan pembangunan yang lain, sehingga diperlukan terwujudnya sinergi dan hasil yang optimal melalui pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan seperti :
 - a Aspek pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
 - b Aspek lingkungan, pemukiman, perumahan, dan sarana-prasarana.
 - c Aspek usaha, lapangan kerja, dan lain-lain yang dapat meningkatkan

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa permasalahan yang diidentifikasi tidak semuanya diangkat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan identifikasi masalah serta penyesuaian dengan judul tesis, masalah-masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembinaan agama melalui Program Qaryah Tayyibah di Dusun Karangrejek ?
2. Adakah pengaruh pembinaan agama melalui Program Qaryah Tayyibah terhadap sikap kemandirian ekonomi kelompok pengajian ibu-ibu Dusun Karangrejek ?
3. Adakah Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan agama pada kelompok pengajian Ibu-ibu di Dusun Karangrejek yang telah mengikuti Program Qaryah Tayyibah ?

D. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan manusia pada umumnya tidak lepas dari tujuan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembinaan agama melalui Program Qaryah Tayyibah di Dusun Karangrejek.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan Pembinaan Agama melalui pelaksanaan Qaryah Tayyibah terhadap sikap kemandirian ekonomi kelompok pengajian Ibu-ibu di dusun Karangrejek guna penyempurnaan program berikutnya bagi lembaga terkait.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan agama kelompok pengajian Ibu-ibu di Dusun Karangrejek yang telah mengikuti Program Qaryah Tayyibah.

E. Faedah Penelitian

Setiap kegiatan penelitian diharapkan memberikan faedah terhadap berbagai pihak. Adapun faedah yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian secara keilmuan diharapkan dapat dimanfaatkan para akademisi, praktisi, dan mahasiswa untuk lebih memahami masalah kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia. Pemahaman terhadap permasalahan ini akan menimbulkan kepedulian terhadap masalah kemiskinan dan kesenjangan dan dapat membantu mencari upaya program aksi untuk penyelesaian permasalahan kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi.
2. Adapun manfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat menemukan model pembinaan agama yang dapat mempengaruhi sikap kemandirian ekonomi masyarakat sehingga dapat diterapkan pada masyarakat ekonomi lemah di tempat lain dengan usaha swadaya masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Sehubungan dengan masalah yang diteliti maka berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, antara lain :

1. Laporan hasil penelitian, "*Dinamika Kelompok Kegamaan sebagai Pendorong Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga*", (Kasus pada Kelompok Pengajian Ibu-ibu di Ledok Tukangan, Danurejan, Kotamadya Yogyakarta) oleh Dra. Hj.Susilaningsih, M.A. tahun 1996/1997. Penelitian ini memaparkan tentang peran kelompok keagamaan dalam usaha penanggulangan kemiskinan.
2. Laporan hasil penelitian kaji tindak IDT (Inpres Desa Tertinggal) di desa Mirit Petikusan, kecamatan Mirit dan desa Pejagatan, kecamatan Kutowinangun, kabupaten Kebumen, oleh Sudharto, P. Hadi,dkk. Dari hasil kajian tersebut diusulkan sejumlah saran sebagai berikut:
 - a. Penduduk miskin yang belum masuk Pokmas seharusnya segera memperoleh perhatian agar pemerataan dana IDT untuk menanggulangi kemiskinan bisa tercapai.
 - b. Pengarahan tentang jenis usaha yang cocok bagi anggota Pokmas sangat diperlukan agar dana IDT menjadi pemacu usaha yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - c. Para pendamping sebaiknya mulai banyak mencurahkan perhatian pada Pokmas "*tertinggal*" agar bisa berjalan sebagai wahana pengembangan usaha dan saling belajar antar anggota. (Mubyarto, 1994-1996 : 44)
3. Laporan hasil penelitian kaji tindak IDT di desa Karangawen, Rongkop, Gunungkidul, Yogyakarta, oleh Mas Soedjono. Dari hasil penelitian ini

internal dan eksternal penduduk desa bersangkutan. Faktor internal antara lain adalah keterbatasan sumber daya alam, prasarana, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan dan faktor sosial budaya yang ada di desa. Sementara itu faktor eksternal desa antara lain: kebijaksanaan ekonomi, peluang kerja dan berusaha yang tidak mungkin diciptakan sendiri oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan. Bagi penduduk miskin kedua faktor tersebut tidak dapat dipecahkan sendiri. Mereka memerlukan dukungan upaya “pemberdayaan” (empowerment) dari sistem sosial, ekonomi, dan politik. (Mubyarto, 1994-1996 : 47)

Penelitian yang dilakukan penulis sangat berbeda dengan penelitian di atas karena penulis membatasi diri pada pelaksanaan pembinaan agama terhadap sikap kemandirian ekonomi masyarakat. Pembinaan agama disini adalah pembinaan dalam rangka memberikan motivasi pada masyarakat dengan tujuan meningkatkan tarah hidup masyarakat yang dilandasi

.....